

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai pertanggungjawaban kepada negara, semua lembaga di Indonesia harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar. Laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Menurut PP 71 Tahun 2010, laporan keuangan harus mencakup neraca (laporan posisi keuangan), laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan.

Masyarakat salahsatu pengguna yang berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah maka memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah dalam mengelola keuangannya (Mardiasmo, 2002). Laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh beberapa instansi tersebut akan digunakan oleh beberapa pengguna. Salah satunya adalah DPRD. DPRD sebagai pengguna dari laporan keuangan tersebut sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus sesuai standar dan bermanfaat bagi penggunanya.

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang pelaporan entitas yang berguna bagi pengguna walaupun sebenarnya mereka diproduksi dengan uang tunai atau akrual (AASB, 2009; IPASASB, 2013). Maksud dari kegunaan disini ditentukan untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengguna internal juga harus mempertimbangkan mengenai pengambilan keputusan, sementara pengguna eksternal harus menggunakan informasi untuk tujuan akuntabilitas (Nogueira et al., 2013). Situasi ini membuktikan bahwa kegunaan laporan keuangan ini untuk pengguna internal dan eksternal.

Laporan dihasilkan oleh pemerintah daerah nantinya akan digunakan oleh beberapa pihak seperti DPRD sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu,

informasi yang terdapat didalam Laporan Keuangan Pemerintah Saerah (LKPD) harus sesuai dan bermanfaat bagi penggunanya. Menurut Mardiasmo (2004) menyebutkan ada sepuluh pemakai laporan keuangan pemerintah yaitu : (1) pengguna jasa, (2) dewan legislatif, (3) pemilih, (4) pegawai, (5) manajemen, (6) investor dan kreditor, (7) pembayar pajak, (8) pemberi dana hibah, (9) badan pengawas, (10) pemasok. Dalam masing-masing pemakai laporan tersebut membutuhkan informasi yang berbeda dari laporan tersebut.

Menurut IFAC (2009) bahwa mengacu pada atribut kualitatif relevansi dan representasi setia sebagai kualitatif fundamental karakteristik yang mendasari kegunaan informasi untuk pengambilan keputusan pengguna.

Tata Kelola yang baik cenderung menghasilkan laporan audit yang berkualitas (Lin & Liu, 2009), hal ini dikarenakan dengan tata Kelola yang baik maka menuntut kualitas audit yang tinggi untuk meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri (Fan & Wong, 2005). Tata Kelola yang baik juga memudahkan auditor dalam memahami internal perusahaan sehingga jasa audit yang diberikan akan jauh lebih maksimal dan efisien. Penelitian ini meyakini bahwa mekanisme tata Kelola perusahaan seperti fungsi audit internal (IAF) adalah bertanggung jawab dalam praktik pelaporan keberlanjutan diperusahaan keuangan. Perusahaan dengan tata Kelola yang kuat menginginkan kualitas audit yang tinggi dan bersedia membayar biaya audit yang tinggi untuk menciptakan nilai perusahaan yang baik (AlQadasi & Abidin, 2018). Karena dengan kualitas audit yang tinggi juga maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas bisa didapatkan dengan kualitas audit internal yang tinggi. Dengan lemahnya audit internal, maka akan lebih mudah ditemukannya kelemahan terhadap kepatuhan perundang-undangan dan belum juga menunjukkan perbaikan yang berarti (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017). Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian.

QS. Al-Hujurat : 9

عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا بَغْتٌ فَإِن كُفِّرَتْ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَانِ وَإِن  
فَأَصْلِحُوا فَاءت فَإِن كُفِّرَتْ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَانِ وَإِن  
الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ كُفِّرَتْ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَانِ وَإِن

” Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. ”

Dalam surat ini Allah memerintahkan untuk benar-benar meneliti berita, sehingga nantinya tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan. Dan berhubungan dengan audit internal ini. Karena dalam melaksanakan audit internal maka harus dilakukan dengan benar dan teliti. Dengan itu kualitas laporan keuangan dapat terjaga.

Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023, Pemkab DIY diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK pada rapat Rapur Istimewa DPRD DIY. Oleh karena itu, DIY dapat mempertahankan Opini WTP tersebut untuk ketiga belas kalinya. Diharapkan pencapaian ini akan mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah, opini WTP diperoleh atas kebenaran informasi keuangan dalam laporan keuangan. Selain itu, karena sistem pengendalian internal yang baik, kepatuhan terhadap undang-undang, dan jumlah pengungkapan yang cukup.

Pemerintah daerah DIY juga telah menerima Opini WTP selama 13 kali berturut turut (DPRD, 2023). Dalam hal pengelolaan dais yang diterima oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dari APBN Pemerintah Pusat, DPRD DIY masih menghadapi masalah karena kurangnya ruang. Selama ini, mulai dari pengusulan awal, perencanaan keuangan belum dilindungi secara hukum oleh DPRD DIY. untuk mengambil bagian dalam pengelolaan dais, meskipun DPRD juga

memiliki tugas pengawasan. Oleh karena itu, peran DPRD dapat ditingkatkan lagi untuk memberikan lebih banyak pengawasan. Penggunaan dana khusus adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Namun, berdasarkan paparan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian (PKA BK), dampak dana istimewa terhadap masyarakat belum terlihat. Jumlahnya masih tinggi jika dilihat dari tingkat kemiskinan. Dana Istimewa sendiri mencapai Rp1,3 miliar pada RAPBN 2023, meskipun jumlah itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, evaluasi dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk meningkatkan fungsi DPRD dan mengoptimalkan hubungan antara DPRD dan pemda. Karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2020 mengatur peran DPRD yang tidak terlihat dalam pengelolaan keuangan daerah, diperlukan peraturan tegas yang melibatkannya (DPR RI, 2023).

Selain itu, audit internal juga berperan penting dalam kegunaan laporan keuangan. Tujuan audit laporan keuangan sektor publik adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan entitas bebas dari salah saji atau tidak berdasarkan bukti audit yang cukup dan tepat (IAASB, 2014). Tata Kelola yang baik cenderung menghasilkan laporan audit yang berkualitas (Lin dan Liu, 2009), hal ini dikarenakan dengan tata Kelola yang baik maka menuntut kualitas audit yang tinggi untuk meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri (Fan dan Wong, 2005). Tata Kelola yang baik juga memudahkan auditor dalam memahami internal perusahaan sehingga jasa audit yang diberikan akan jauh lebih maksimal dan efisien. Penelitian ini meyakini bahwa mekanisme tata Kelola perusahaan seperti fungsi audit internal (IAF) adalah bertanggung jawab dalam praktik pelaporan keberlanjutan di perusahaan keuangan. Perusahaan dengan tata Kelola yang kuat menginginkan kualitas audit yang tinggi dan bersedia membayar biaya audit yang tinggi untuk menciptakan nilai perusahaan yang baik (AlQadasi dan Abidin, 2018). Karena dengan kualitas audit yang tinggi juga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas bisa didapatkan dengan kualitas audit internal yang tinggi. Dengan lemahnya audit internal, maka akan lebih

mudah ditemukannya kelemahan terhadap kepatuhan perundang-undangan dan belum juga menunjukkan perbaikan yang berarti (BPK, 2023). Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian.

Dampak masalah lingkungan pada manajemen bisnis, audit, akuntansi, dan system pengungkapan harus diperhatikan oleh akuntan. Perlindungan lingkungan dan potensi keterlibatan merupakan masalah populer dikalangan akuntan diseluruh dunia (Pramanik *et al*, 2007). Dengan demikian, akuntan untuk saat ini dan dimasa depan akan diprediksi mengambil fungsi biaya lingkungan. Dikarenakan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh hal-hal industry yang harus diinternalisasi dalam akun organisasi. Untuk itu, pelaporan dan akuntansi lingkungan sangat penting saat ini.

Tujuan dari akuntansi lingkungan ini pada setiap organisasi bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tingkat efisiensi yang baik untuk kegiatan pelestarian lingkungan dan perusahaan operasi bisnis secara keseluruhan (Kundu dan Hauff, 2009). Laporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh masalah lingkungan dalam banyak hal. Beberapa standar akuntansi internasional menyatakan prinsip prinsip umum untuk pengukuran, pengungkapan masalah lingkungan, dan pengakuan dalam laporan keuangan (IAS-39), seperti *International Financial Reporting Standard (IFRS)*, *Financial Accounting Standard Board (FASB)*, dan *International Accounting Standard Board (IASB)*.

Laporan keuangan harus berguna dan memberikan informasi berkualitas yang akan diberikan kepada penggunanya. Yang dimaksud dengan informasi yang berkualitas terdapat dalam FASB dalam SFAC No. 2 tahun 1980 menyatakan bahwa “ada dua kriteria yang menyatakan laporan keuangan berkualitas, yaitu berkualitas primer dan berkualitas primer”. FASB menyatakan kualitas primer itu relevan dan reliabel. Sedangkan kualitas sekunder itu comparable dan consistency.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Helden dan Reichard, (2019) menunjukkan bahwa ada kurangnya penelitian empiris tentang kebutuhan pengguna dan kegunaan informasi akuntansi di sektor publik, dan bahwa lebih banyak penelitian diperlukan untuk memahami kondisi atau konteks yang berkontribusi pada penggunaan informasi akuntansi. Peneliti menjelaskan bahwa perlunya perhatian lebih untuk diberikan pada kebutuhan informasi spesifik dan motivasi berbagai kelompok pemangku kepentingan yang tertarik untuk menggunakan informasi keuangan di sektor publik. Selain itu juga, Nogueira *et al.* (2013) sudah melakukan penelitian sebelumnya di pemerintah daerah portugis tentang tingkat kegunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan internal dan sejauh mana kegunaan laporan keuangan ini berpengaruh.

Kontribusi penelitian ini adalah melakukan pengembangan dari penelitian yang dimana penelitian ini menambah variabel internal audit akuntansi lingkungan, dan kualitas laporan keuangan sebagai variable independent, dengan variable kegunaan laporan keuangan sebagai variable dependen. Peneliti menganggap bahwasanya audit internal, akuntansi lingkungan, dan kualitas laporan keuangan dapat mempengaruhi kegunaan laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu, terdapat variable akuntansi lingkungan yang mana variable tersebut jarang diteliti lebih dalam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui persepsi pengguna laporan keuangan di DPRD Yogyakarta terhadap kegunaan laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran apakah pengguna laporan keuangan dapat memanfaatkan informasi yang ada di laporan keuangan. Peneliti termotivasi untuk melengkapi dari penelitian yang sudah ada dan memasukkan variabel baru serta mengkaji audit internal dan akuntansi lingkungan terhadap kegunaan laporan keuangan dalam konteks pemerintahan. Maka dari itu, penelitian ini berjudul “Pengaruh Audit Internal dan Akuntansi Lingkungan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan dengan Kualitas Laporan

Keuangan sebagai Variabel Pemediasi”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah peran Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan (*Usefulness*)?
2. Apakah Akuntansi Lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan (*Usefulness*)?
3. Apakah Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan? (*Usefulness*)?
4. Apakah peran Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
5. Apakah Akuntansi Lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
6. Apakah Peran Audit Internal secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan?
7. Apakah Akuntansi Lingkungan secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menguji secara empiris Peran Internal audit berpengaruh positif terhadap Kegunaan Laporan Keuangan.
2. Menguji secara empiris peran Akuntansi Lingkungan berpengaruh positif terhadap Kegunaan Laporan Keuangan.
3. Menguji secara empiris Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Kegunaan Laporan Keuangan.
4. Menguji secara empiris peran Internal Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

5. Menguji secara empiris peran Akuntansi Lingkungan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
6. Menguji secara empiris peran Internal Audit terhadap Kegunaan Laporan Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan.
7. Menguji secara empiris peran Akuntansi Lingkungan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai *kegunaan laporan keuangan* secara lebih luas lagi. Penelitian ini fokus membahas mengenai kegunaan laporan keuangan, khususnya perannya terhadap audit internal, akuntansi lingkungan, dan kualitas laporan keuangan sehingga diharapkan dapat membantu penggunaannya dalam meningkatkan kualitas kegunaan laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diambil di antaranya:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

- b. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat terbantu dengan adanya penelitian ini dalam rangka mengetahui tentang kegunaan laporan keuangan karena sudah mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kegunaan laporan keuangan Bagi Praktisi

Akuntansi Sektor Publik. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Akuntansi Sektor Publik dapat menjadikan hasil penelitian mengenai kegunaan laporan keuangan sebagai saran dan masukan dalam menjalankan tugasnya di Sektor Publik.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan ilmu dan pengetahuan yang baru serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai kegunaan laporan keuangan.

d. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, pembaca diharapkan memiliki referensi yang dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya.